



PIDATO

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN ACARA PENYAMPAIAN PENGANTAR RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2025 DAN RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT SELASA, 5 AGUSTUS 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

**YTH. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN
OPD, DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pagi hari ini kita kembali dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan agenda Penyampaian Pengantar terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Wakil Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Hari ini Selasa tanggal 5 Agustus 2025, dengan Agenda Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Sdr. Wakil Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa time skedul pembahasan dan penetapan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Ranperda tentang Perubahan

APBD Tahun 2025 berpedoman kepada SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025. Sesuai dengan SE Mendagri tersebut, penyampaian, pembahasan dan penetapan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025, dilakukan mendahului penyampaian, pembahasan dan penetapan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2026.

Hal ini bertujuan untuk percepatan penyesuaian arah kebijakan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden yang termuat dalam Asta Cita dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dilantik pada bulan Februari 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 24 Juli 2025 yang lalu, Gubernur dan DPRD telah menyepakati Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dengan telah ditetapkan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025, maka dilanjutkan dengan pembahasan dan penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025.

Time skedul penyampaian, pembahasan dan penetapan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025, berbeda dengan time skedul yang ditetapkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Namun, hal ini tidak berdampak dan berpengaruh terhadap pembahasan dan penetapan KUA-PPAS Tahun 2026 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2026.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan dan time skedul pembahasan dan penetapan Perubahan APBD Tahun 2025, pada Rapat Paripurna ini Gubernur Sumatera Barat akan menyampaikan kepada DPRD, Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Sebelum Sdr. Gubernur menyampaikan Nota Pengantar tersebut, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa catatan yang terdapat dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 yang perlu diakomodir dalam penyusunan

Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Target pendapatan yang disepakati dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 baru bersifat tentatif dan masih bisa ditingkatkan. Untuk itu, diminta kepada Pemerintah Daerah menghitung kembali target rill pada penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 dengan memperhatikan dan memaksimalkan semua potensi pendapatan daerah terutama yang bersumber dari PAD.
2. Alokasi belanja daerah yang disepakati dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup tajam dari alokasi yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2025. Hal ini disebabkan karena tidak tertutupnya defisit murni, baik dari upaya peningkatan pendapatan maupun dari SILPA APBD Tahun 2024. Oleh sebab itu, kita perlu mencari kembali sumber-sumber penerimaan untuk dapat mengalokasikan kembali beberapa kegiatan prioritas yang di drop atau dikurangi anggarannya.

Sdr. Wakil Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran yang sangat strategis sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk dapat berfungsi secara optimal dan kompetitif, tentu dibutuhkan penguatan struktur permodalan yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kesinambungan.

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda), berperan penting dalam menjawab kebutuhan penjaminan kredit, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Seiring dengan perubahan bentuk hukum perusahaan menjadi Perseroan Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2024, maka langkah selanjutnya adalah memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal pemerintah daerah.

Langkah ini bukan semata formalitas administratif, namun merupakan wujud kepercayaan, komitmen, dan strategi pembangunan jangka panjang untuk memperkuat daya saing, memperluas cakupan layanan, serta mendukung ketahanan ekonomi daerah. Selain itu, dividen yang dihasilkan juga menjadi sumber PAD yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan daerah.

Tanpa dukungan permodalan yang cukup, BUMD akan berisiko menjadi entitas bisnis yang stagnan, sulit berinovasi, dan tidak mampu menjawab tantangan zaman seperti transformasi digital, efisiensi operasional, serta pengembangan produk dan jasa berbasis kebutuhan lokal. Di sinilah pentingnya kita memandang penyertaan modal bukan sebagai beban, melainkan sebagai investasi strategis jangka panjang untuk masa depan kemandirian ekonomi daerah.

Sdr. Wakil Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal-hal penting Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD, khususnya PT Jamkrida Sumbar (Perseroda), harus menjadi perhatian utama. Penyertaan modal hanyalah satu aspek dari penguatan BUMD, namun jauh lebih penting adalah bagaimana modal tersebut dikelola secara profesional, tepat sasaran, dan menghasilkan dampak ekonomi yang terukur.

Kedua, kami mendorong agar Pemerintah Daerah menyusun rencana bisnis (business plan) yang jelas, realistis, dan berorientasi pada hasil, sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan penyertaan modal. Rencana bisnis tersebut harus mencakup proyeksi usaha, target capaian, strategi mitigasi risiko, serta mekanisme evaluasi kinerja yang terukur dan periodik.

Ketiga, perlu ada penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap Perseroda, termasuk dari unsur independen, untuk memastikan bahwa perusahaan tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Keempat, kami juga mendorong Pemerintah Daerah untuk menjaga proporsi penyertaan modal agar tetap seimbang dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak mengorbankan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Sdr. Wakil Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar pada Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Sdr. Wakil Gubernur menyampaikan

ke dua (dua) Ranperda tersebut, Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....
(Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat)

.....
Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Pengantar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Rapat Paripurna dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Dari pengantar yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur, kita sudah dapat mengetahui rencana anggaran Pemerintah Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025, yang mencakup rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Rencana anggaran Pemerintah Daerah yang diusulkan pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 tersebut, perlu kita bahas dan dalami nanti dengan

memperhatikan beberapa catatan yang diberikan oleh DPRD pada pembahasan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 dan beberapa hal yang kami kemukakan di atas.

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, terhadap Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, Fraksi-Fraksi akan memberikan pandangannya terhadap Ranperda tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Fraksi-Fraksi untuk melihat dan mendalami kembali Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja serta dapat memberikan pandangan, pendapat dan masukan-masukan yang komprehensif, agar Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat lebih akomodatif, efektif, efisien dan akuntabel.

Berdasarkan agenda kegiatan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, penyampaian Pandangan Umum

Fraksi-Fraksi tersebut, akan disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan besok, Rabu tanggal 11 Agustus 2025.

Sdr. Wakil Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah disampaikan Nota Pengantar Gubernur terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan membacakan “ Alhamdulillahirabbilalimin “ Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pengantar Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih
Billahitaufiqwalhidayah
Wass.wr.wb